

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, KETAATAN
PADA PERATURAN PERUNDANGAN DAN KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI DAN KINERJA MANAJERIAL
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)**

Oleh:

Muhammad Hafiz

Pembimbing : M. Rasuli dan Pipin Kurnia

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : hafismhd23@yahoo.com*

*Effect Of Government Competence Apparatus, Compliance With Regulation
Legislation, Budgetary Goals Clarity On Accountability Performance
Budget Targets Government Commitment With The Organization
And Managerial Performance As A Moderating Variable
(Empirical Study On Kampar District Government)*

ABSTRACT

This study aims to look at the effect of the competence of the government apparatus, adherence to laws and regulations, and budget goal clarity to the accountability of the performance of government agencies with organizational commitment and managerial performance as a moderating variable in the SKPD in Kampar regency. This research was carried out on 33 working units are located in Kampar regency in 2016. The samples were used as respondents drawn using purposive sampling method. Each population is represented by three respondents, chief financial officer, treasurer, and chief of staff of the program. Questionnaires were distributed to 99 respondents, and successfully recovered the complete answer is obtained from 45 respondents. Data collected from 45 respondents further data were analyzed with SPSS version 2.0 using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis to generate test classic assumptions, data analysis model, the coefficient of determination and prove the hypothesis. The results found that the simultaneous partial or variable competence of the government apparatus, adherence to laws and regulations, and budget goal clarity and organizational commitment and managerial performance as moderating variables affect the performance accountability of government agencies.

Keywords: Competence, Obedience, Budget Targets, Commitment, Performance, and Accountability

PENDAHULUAN

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan

pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Adapun salah satu isu permasalahan yang ditemukan dan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Pada Tahun anggaran 2014. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Kampar. LHP atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dikemas dalam 3 buku. Buku I adalah LHP yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah dengan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Opini atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu: (1) Penyajian nilai investasi permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar, BMT dan DKUKM belum menggambarkan kondisi senyatanya. (2) Persiapan Pemerintah Kabupaten Kampar menuju Pelaporan Keuangan berbasis akrual belum memadai. (3) Penatausahaan investasi non permanen dalam bentuk hewan ternak pada Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. (4) Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran belum menggambarkan kondisi senyatanya. (5) Selisih lebih penyajian Nilai Aset Tetap per 1 Januari 2014 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2014 belum dapat dijelaskan.

Selain hal-hal di atas, BPK juga menemukan Permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kabupaten Kampar, antara lain; (1) Sisa uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 dan potongan Pajak terlambat disetor ke Kas Daerah dan Kas Negara; (2) Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan pada 7 (tujuh) paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Denda Keterlambatan; (3) Penerima belanja Hibah TA 2014 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana; (4) Terdapat kelebihan pembayaran atas Biaya penginapan pada 3 (tiga) SKPD Kabupaten Kampar

Dari isu permasalahan di atas bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting-pelaksanaannya dalam pencapaian *good governance*. Seluruh satuan kerja perangkat daerah sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan pemerintah tersebut agar tujuan dan rencana kerja pemerintah bisa tercapai dan terlaksana secara efisiensi dan efektivitas. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundang-undangan telah digulirkan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari penelitian Wardhana (2015) dan

dengan judul Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi dan Primadona (2010) dengan judul kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah dengan kinerja manajerial sebagai variabel moderating. Dan menambahkan variabel Ketaatan Peraturan Perundangan dari penelitian yang dilakukan oleh Oktrianda(2010) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Dumai. Digunakannya variabel moderasi pada penelitian ini, yaitu untuk lebih memastikan hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi bahwa terdapatnya beberapa kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yaitu salah satunya terdapatnya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan juga terdapat permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kabupaten Kampar, serta dikarenakan faktor pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:(1)ApakahKompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)? (2) Apakah Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP)? (3) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? (4) ApakahKompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan di-moderasi oleh Komitmen Organisasi? (5) Apakah Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi? (6) Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi? (7) Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan dimoderasi oleh Kinerja manajerial? (8) Apakah Ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan dimoderasi oleh Kinerja manajerial? (9) Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan dimoderasi oleh Kinerja manajerial?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pada: (1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerahterhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (2) Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (3) Pengaruh

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (4) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setelah dimoderasi oleh Komitmen Organisasi (5) Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setelah dimoderasi oleh Komitmen Organisasi (6) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setelah dimoderasi oleh Komitmen Organisasi (7) Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setelah dimoderasi oleh Kinerja manajerial (8) Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setelah dimoderasi oleh Kinerja manajerial (9) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setelah dimoderasi oleh Kinerja manajerial.

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik (BPKP,2011).

Kompetensi Aparatur pemerintah

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) kompetensi didefi-

nisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Ketaatan pada Peraturan Pemerintah

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Soleman : 2007).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Komitmen Organisasi

Menurut sutrisno (2011) Komitmen organisasi adalah perasaan keterkaitan atau kerikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggotanya.

Kinerja Manajerial

Mulyadi (2010) mendefinisikan kinerja manajerial adalah suatu

rangkaian perilaku manajer dalam melaksanakan peran mereka dalam organisasi untuk mencapai target dan sasaran organisasi. Selanjutnya kinerja manajerial menurut Stoner (1992) adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. Karena kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pernyataan ini didukung oleh Oktiana (2010) yang meneliti pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap AKIP di Kota Dumai menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap AKIP. Akan tetapi ketidak konsistenan dalam hasil yang dilakukan oleh Zirman (2010) yang menyatakan Kompetensi Aparatur Pemerintah Tidak Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H1: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Ketaatan Pada Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketaatan pada peraturan perundangan yang semakin baik dan taat akan dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktiana S (2010) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif atas ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2: Ketaatan pada Peraturan Perundangan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, sehingga semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah akan berpengaruh

terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

Menurut Kenis dalam Setiawan (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran.

H3: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Dalam menghasilkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan memadai diperlukan kompetensi aparatur pemerintah yang baik, mulai dari pengetahuan yang memadai, skil yang mempunyai, serta pengalaman yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik yang dicapai oleh aparat pemerintah. Dan apabila hal tersebut diperkuat dengan adanya komitmen tinggi yang dimiliki oleh seorang aparat terhadap organisasinya. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparat pemerintah dalam bekerja akan menghasilkan kinerja yang semakin baik sehingga dapat mempertanggungjawabkannya kepada publik, dan tentu akan tercapainya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sesuai yang ditargetkan.

Soleman (2007) yang meneliti mengenai kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H4: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Pengaruh Ketaatan Pada Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mempengaruhi AKIP dengan diperkuat oleh komitmen organisasi, hal ini didasari dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan akan tercipta apabila seorang aparat memiliki komitmen terhadap organisasinya. Sehingga apabila seorang aparat taat terhadap peraturan perundangan pemerintah hal itu diperkuat dengan komitmen terhadap organisasinya yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat menunjang dalam pekerjaannya yang menghasilkan kinerja yang baik, kinerja yang baik tersebut dipertanggungjawabkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ini sejalan dengan penelitian Soleman (2007) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif atas ketaatan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demi mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang baik, harus didasari oleh peraturan yang berlaku begitu juga dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H5: Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, namun hal itu didasari komitmen seorang aparat pemerintah terhadap organisasinya barulah tercapainya tujuan tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah dengan diperkuat oleh komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah sehingga tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2010) dan Primadona (2010) menyimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, Begitu pula jika Kejelasan Sasaran Anggaran dimoderasi oleh Komitmen Organisasi.

H6: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi

Dalam menghasilkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan memadai diperlukan kompetensi aparatur pemerintah yang baik, mulai dari pengetahuan yang memadai, skil yang mempunyai, serta pengalaman yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik yang dicapai oleh aparat pemerintah. Dan apabila hal tersebut diperkuat dengan adanya kinerja yang baik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, maka akan dapat mempertanggungjawabkannya kepada publik, dan tentu akan tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai yang ditargetkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulian (2010) dan Oktrianda (2010) yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah begitu pula jika dimoderasi oleh Kinerja Manajerial.

H7: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Kinerja Manajerial

Pengaruh Ketaatan Pada Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating

Ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun dengan diperkuat oleh kinerja manajerial, hal ini didasari dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan akan tercipta apabila seorang aparat dan manajer suatu instansi menghasilkan kinerja yang baik, sehingga akan dapat mencapai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miftahul (2010) dan Hady (2010) menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

H8: Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Kinerja Manajerial

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, namun hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya kinerja yang dihasilkan oleh manajerial

barulah tercapainya tujuan tersebut. Sehingga dengan diperkuat oleh kinerja manajerial akan berpengaruh terhadap tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Riza (2015) Menyimpulkan bahwa Kinerja Manajerial mampu memperkuat pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H9: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi oleh Kinerja Manajerial

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar, yang terdiri dari 33 SKPD.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria Anggota populasi yang menjadi 3 sampel per-populasi yaitu kepala sub bagian keuangan, bendaharawan kepala staff program Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga berjumlah sampel adalah 99 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada kepala sub bagian keuangan, bendahara dan kepala staf program Satuan perangkat kerja Kabupaten Kampar yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Didalam penelitian terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, Uji koefisien determinasi, dan Uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 45 responden. Variabel Kompetensi Aparatur (X_1) terdiri dari 10 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Kompetensi Aparatur sebesar 40,64. Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X_2) terdiri dari 5 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Ketaatan pada Peraturan Perundangan sebesar 20,33. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3) terdiri dari 3 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 10,68.

Komitmen Organisasi (M_1) terdiri dari 11 pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Komitmen Organisasi sebesar 46,91. Kinerja Manajerial (M_2) terdiri dari 12 pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Kinerja Manajerial sebesar 48,64. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) terdiri dari 7 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 28,08.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengukur validitas pertanyaan kuesioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan : Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka skor butir pertanyaan kuesioner valid, dan berlaku sebaliknya.

Menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur, Ketaatan pada Peraturan Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja Manajerial serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai signifikansi $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini berarti menyatakan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan dari hasil uji reabilitas data menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Kompetensi Aparatur sebesar 0,632, Ketaatan pada Peraturan Pemerintah sebesar 0,793, Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0,783, Komitmen Organisasi sebesar 0,644, Kinerja Manajerial sebesar 0,860, serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,867. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel* karena mempunyai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila

pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dapat terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk semua persamaan regresi signifikan di atas 0,05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari kedua hasil uji normalitas baik analisis grafik maupun uji statistik dapat disimpulkan bahwa model-model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Heterokedastisitas Data

Dari gambar grafik *Scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Hasil uji multikolinieritas di atas, hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linear

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda

(*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * M + \beta_5 X_2 * M + \beta_6 X_3 * M + \beta_7 X_1 * M1 + \beta_8 X_2 * M2 + \beta_9 X_3 * M2 + e$

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis Kompetensi Aparatur Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $4,262 > 2,020$ dan $\text{sig.}t(0,000) < 0,05$ dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif, keberhasilan pelaksanaan tugas umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan tercapai apabila seorang aparat memiliki kompetensi yang baik.

Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktrianda (2010) dan Yulian (2010) yang menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap AKIP.

Hasil Uji Hipotesis Ketaatan pada Peraturan Pemerintah Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu $5,200 > 2,020$ dan

sig.t (0,000) < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima.

Ketaatan pada peraturan perundangan yang semakin baik dan taat akan dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rozi (2010) yang menyimpulkan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap AKIP karena Untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah di-dukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan unishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas.

Hasil Uji Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu 2,496 > 2,020 dan sig.t (0,017) < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H3 diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Penelitian ini sejalan dengan Primadona (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .

Hasil Uji Hipotesis Kompetensi Aparatur Pemerintah Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu 3,007 > 2,020 dan sig.t (0,000) < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H4 diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi.

Dan apabila Kompetensi diperkuat dengan adanya komitmen tinggi yang dimiliki oleh seorang aparat dalam mencapai tujuan organisasi, kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparat pemerintah dalam bekerja akan menghasilkan kinerja yang semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktrianda (2010).

Ketaatan pada Peraturan Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu 2,446 > 2,020 dan sig.t (0,021) < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H5 diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Ketaatan pada Peraturan Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mempengaruhi AKIP dengan diperkuat oleh komitmen organisasi, hal ini didasari dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan akan tercipta apabila seorang aparat memiliki komitmen terhadap organisasinya, Sehingga apabila seorang aparat taat terhadap peraturan perundangan pemerintah hal itu diperkuat dengan komitmen terhadap organisasinya yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2010) dan Rozi (2010)

Hasil Uji Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu $6,882 > 2,020$ dan $\text{sig.t} (0,014) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_6 diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi.

Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusuntarget anggaran. Namun hal itu didasari komitmen seorang aparat pemerintah terhadap organisasinya barulah tercapainya tujuan tersebut, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2010).

Uji Hipotesis Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan

Kinerja Manajerial sebagai variabel moderasi

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu $2,483 > 2,020$ dan $\text{sig.t} (0,000) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_7 diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel moderasi.

Apabila kompetensi diperkuat dengan adanya kinerja yang baik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, maka akan dapat mempertanggungjawabkannya kepada publik, dan tentu akan tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai yang ditargetkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2010).

Uji Hipotesis Ketaatan pada Peraturan Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel Moderasi

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu $2,826 > 2,020$ dan $\text{sig.t} (0,001) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_8 diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Ketaatan pada Peraturan Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel moderasi.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mempengaruhi AKIP dengan diperkuat oleh kinerja manajerial, hal ini didasari dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan akan tercipta apabila seorang aparat dan manajer suatu

instansi menghasilkan kinerja yang baik, sehingga akan dapat mencapai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah melalui LAKIP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Collins (2015) namun tidak sejalan dengan yulian (2010).

Uji Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel Moderasi

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa yaitu $3,805 > 2,020$ dan $\text{sig.t} (0,035) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka terdapat keputusan yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel mode-rasi.

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, namun hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya kinerja yang dihasilkan oleh manajerial barulah tercapainya tujuan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza (2015) namun tidak sejalan dengan lesmana (2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi memperkuat pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis keenam membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi memperkuat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh membuktikan bahwa variabel Kinerja Manajerial memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan membuktikan bahwa variabel Kinerja Manajerial memperkuat pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akun-

tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan membuktikan bahwa variabel Kinerja Manajerial memperkuat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu (1.) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Kampar, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perludilakukan penelitian yang lebih luas. (2.) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta).
- Pamungkas, Bambang. 2005. Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading,
- Cefrida, Mentari. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Jurnal. Pekanbaru: Universitas Riau
- Oktiandra S. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disertasi, Unpad.
- Setiawan, Eko. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntabilitas dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (studi kab. Pelalawan). Jurnal. Pekanbaru: Universitas Riau
- Saputra, Hady Rinazta, 2010, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Studi pada SKPD Kuantan Singingi, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

- Sumiati, 2012, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Siak, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Wardhana, gede ary, 2015, Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Universitas Udayana. Bali.
- Yue, M. Y. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Universitas Riau. Pekanbaru.
- Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 1, maret 2010. Pekanbaru: Universitas Riau
- BPK. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
- Peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- UU Nomor 25 Tahun 1999 Kepala Daerah di samping menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01 IM.PAN/01/2009
- Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan praktek good governance khususnya akuntabilitas untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003, "Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Jakarta.
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2004.tentang Perbendaharaan Negara